

ISSN 2087 - 1511



**Jurnal
Pembangunan dan
Kebijakan Publik**

VOLUME 12, NO. 2, TAHUN 2021



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GARUT**

EDITORIAL TEAM

Chief Editor

Dini Turipanam Alamanda, S.Tp., M.SM., Faculty Economics, Garut University

Associate Editors

- Rostiena Pasciana, SS.,M.Si., Faculty of Social Science and Political Science, Garut University
- Hasbi Shiddiq Fauzan, S.IP. M.AP., Faculty of Social Science and Political Science, Garut University
- Pupung Pundenswari, S.IP. M.Si., Faculty of Social Science and Political Science, Garut University
- Mila Karmila, S.IP., Faculty of Social Science and Political Science, Garut University
- Riska Nurnafajrin, S.IP., Faculty of Social Science and Political Science, Garut University
- Imas Astri Mustakiah, S.IP., Faculty of Social Science and Political Science, Garut University

DAFTAR ISI

Analisis Dampak Relokasi Pembangunan Rel Kereta Api Cibatugur

Ade Purnawan, Nurbudiwati Nurbudiwati, Aji Abdul Wahid, Dea Suci Mawarni

1-8

 PDF

Implementasi Sistem Informasi Aplikasi Teknologi Siklus Barang Daerah Terhadap Kualitas Penatausahaan Barang Daerah di Kabupaten Garut

Mila Karmila

9-16

 PDF

Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul

Akmala Hadita, Nurbudiwati Nurbudiwati, Andriansyah Andriansyah

17-24

 PDF

Analisis Kebijakan Kartu Pra Kerja Dalam Upaya Peningkatan Skill Para Calon Pekerja di Kabupaten Garut

Riksa Raesalat, Shella Lutfi Alifia

23-28

 PDF

Pengaruh Kompetensi Profesional Tenaga Pendidik Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama

Ema Rismayanti, Enung Trisnawati, Ikeu Kania Kania

29-35

 PDF



KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN JAYAWARAS KECAMATAN TAROGONG KIDUL

Akmala Hadita¹; Nurbudiwati²; Andriansyah³

¹²³ Administrasi Negara, FISIP Universitas Garut

Program BNPT di Kelurahan Jayawaras baru diadakan pada tahun 2018 yang dimana terdapat 230 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 14 Rukun Warga (RW) yang diharapkan dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan teknik wawancara dengan beberapa narasumber yang diperlukan sehingga mendapatkan data yang akurat mengenai seluruh permasalahan yang penulis temukan dalam kebijakan BPNT dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul. Hasil Penelitian tentang Kebijakan BPNT di Kelurahan Jayawaras dapat dikatakan berhasil karena dapat mengurangi beban kebutuhan sehari-harinya dimana KPM mendapatkan asupan gizi yang baik untuk keluarganya. Selain itu pengelolaan agen e-Warong di Kelurahan Jayawaras pun sangat baik dikarenakan koordinasi dengan Kelurahan dan Bank penyalur selalu dilakukan. Oleh karena itu pengelolaan Agen E-Warong di Kelurahan Jayawaras selalu dijadikan sampel untuk pemeriksaan Dinas Sosial dan juga dijadikan sebagai contoh oleh kelurahan/ desa yang lain karena pengelolannya yang baik.

Kata Kunci : Kebijakan, Program BPNT, Kemiskinan

1. Pendahuluan

Suatu Negara tentu memiliki suatu permasalahan yang banyak di dalam lingkungan masyarakatnya, dalam hal ini seperti permasalahan kemiskinan. Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang (Djaenal et al., 2021). Kemiskinan merupakan suatu keadaan/ kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi (Julianto, 2020; Kania et al., 2019).

Oleh karena itu kemiskinan salah satu masalah sosial yang sangat penting untuk dikurangi bahkan dihilangkan dalam kehidupan masyarakat (Ikeu Kania & Iis Zilfah Adnan, 2007; Istan, 2017). Apabila terjadi kenaikan angka kemiskinan di pastikan munculnya permasalahan – permasalahan sosial lainnya dan juga terjadi konflik – konflik di lingkungan masyarakat. Rasa kecewa dan ketidakpuasan masyarakat miskin biasanya dilampiaskan dengan tindakan yang anarkis. Bahkan seringkali konflik bernuansa SARA timbul di masyarakat sebagai cara pelampiasan kekecewaan masyarakat miskin tersebut terhadap pemerintah.

Selain itu, masalah kemiskinan ini akan berdampak juga terhadap rendahnya kualitas kesehatan di masyarakat (Jonaidi, 2012; Kania et al., 2020). Hal ini dikarenakan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Gizi yang buruk merupakan masalah yang sering terjadi pada masyarakat miskin. Asupan gizi yang kurang menyebabkan kesehatan dan perkembangan fisik masyarakat miskin sangat uruk, sehingga menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat miskin.

Untuk menurunkan kemiskinan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dengan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah (Hartawan, 2020; Iriany et al., 2019). Pemerintah sebagai administrator publik bertugas memecahkan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui pembuatan, penetapan/pengesahan dan pelaksanaan kebijakan dan/program serta melakukan evaluasi mengenai penurunan kemiskinan (Ulumudin et al., 2020).

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang diharapkan dapat membantu mengurangi beban dari masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan yang dapat memberikan gizi lebih seimbang yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrerian Negara/Lembaga, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Bantuan Pangan Non Tunai ini merupakan penyempurnaan dari program Beras Sejahtera (Rasta) yang mulai di laksanakan pada tahun 2017 dengan mengharapkan prinsip 6T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Kualitas, Tepat waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Administrasi (Yunus, 2019). Bantuan sosial pangan ini disalurkan dalam bentuk nontunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KMP) setiap bulannya dan hanya untuk membeli bahan pangan sembako bernutrisi sesuai dengan jumlah dan kualitas yang di inginkan.

Keluarga Penerima Manfaat akan mendapatkan alat pembayaran elektronik atau biasa disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diberikan oleh Bank umum milik Negara sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai untuk menampung dana belanja pangan (Aceng Ulumudin et al., 2020; A. Ramdhani et al., 2019). KKS digunakan sebagai alat penanda KPM dan berfungsi sebagai kupon elektronik yang menyimpan nilai besaran manfaat bantuan pangan yang diberikan. Besaran manfaat BPNT adalah Rp.110.000/KPM/bulan dan tidak dapat di ambil tunai atau hanya dapat ditukarkan dengan beras/telur sesuai kebutuhan KPM di e-Warong (Gugun Geusan Akbar et al., 2019).

Penerima manfaat BPNT merupakan keluarga dengan kondisi social ekonomi terendah di daerah pelaksanaan yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh Kementrian Sosial. DPM BPNT ini bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). Oleh karena itu pada dasarnya BPNT mempunyai sasaran dan sosialisasi terhadap KMP (Keluarga Penerima Manfaat), Pemilik/pengelola E-Warong, Bank Penyalur, dan Masyarakat Umum.

Dari Kecamatan Tarogong Kidul itu sendiri BPNT baru di adakan pada tahun 2018, dimana terdapat 12 Desa/Kelurahan yang terbagi menjadi 7 Desa dan 5 Kelurahan. Dari semua Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tarogong Kidul penulis melakukan study kasus di Kelurahan Jayawaras yang terbagi menjadi 19 Rukun Warga (RW).

Berdasarkan jumlah Rukun Warga yang ada di Kelurahan Jayawaras terdapat penurunan angka kemiskinan dari tahun 2018-2019 tentunya penurunan ini merupakan nilai baik yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penekanan angka kemiskinan. Hal itu juga merupakan harapan dari masyarakat miskin untuk merubah kehidupannya dari program-program kebijakan pemerintah.

Program BPNT dapat membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pengeluaran bahan pangan, di harapkan dapat meningkatkan gizi yang lebih baik, dan menekan angka kemiskinan di

Kelurahan Jayawaras agar taraf hidup masyarakat miskin bisa lebih baik. Dari 1893 keluarga miskin di Kelurahan Jayawaras tidak semua menerima program Bantuan Pangan Non Tunai, ada yang mendapatkan 2 program bantuan yaitu PKH dan BPNT, ada juga yang mendapatkan BPNT saja.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, ditemukan fenomena masalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya kartu tidak berhasil di gesek. Menurut pengamatan penulis hal ini terjadi karena faktor seperti kartu yang hilang, kartu yang rusak ataupun kartu yang eror. Dan itu dapat merugikan KPM dimana bantuan pangan non tunai ini tidak dapat di cairkan.
- b. Dari 1.893 masyarakat miskin hanya 230 KPM yang menerima program BPNT. Sehingga program bantuan belum binya menyentuh masyarakat miskin secara seutuhnya.

Dari pernyataan di atas rendahnya kualitas hidup penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan yang berpendapatan rendah tentu sangat membutuhkan bantuan-bantuan untuk merubah taraf hidupnya agar lebih baik. Oleh karena itu sangat diharapkan tujuan dari program BPNT dapat berjalan dengan baik agar memberikan dampak terhadap keadaan Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Jayawaras serta dapat menurunkan atau menekan angka kemiskinan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (M. A. Ramdhani & Ramdhani, 2016; Sugiyono, 2017). Deskriptif data yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu data deskriptif tentang Bagaimana Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Sekertaris Kelurahan Jayawaras, Agen E-Warong BPNT Kelurahan Jayawaras, dan juga KPM Kelurahan Jayawaras (Kuriawan et al., 2019; A. Ramdhani et al., 2018).

3. Hasil dan Implikasi

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk nontunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada masyarakat miskin dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan dimana akan ditetapkan sebagai penerima BPNT yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang namanya termasuk di dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan juga Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dimana besaran manfaat BPNT adalah Rp.110.000/KPM/bulan. Bantuan Pangan Non Tunai ini merupakan penyempurnaan dari program Beras Sejahtera (Rasta) yang di atur di dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan berubah menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang mulai di laksanakan pada tahun 2018 dengan mengharapkan prinsip 6T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Kualitas, Tepat waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Administrasi.

Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Jayawaras diharapkan akan terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan dukungan dari pihak-pihak terkait yang terus mengawasi kelancaran dari program BPNT tersebut. Dalam hal ini pihak-pihak dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masing-masing pelaksana

memegang peranan penting dalam keberhasilan dari pelaksanaan BPNT, dimana semua pihak memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus saling berkoordinasi untuk mensukseskan program tersebut.

Dengan adanya sosialisasi, pengawasan, dan keterlibatan dari semua pihak terkait tentu dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Jayawaras. Dalam melakukan analisis penelitian tentang kebijakan BPNT ini harus sesuai dengan 5 faktor yang terdapat pada kerangka pemikiran yaitu Keputusan, Sasaran, Pelaksanaan, Pendapatan, dan Kebutuhan.

- a. Bagaimana Kebijakan BPNT dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul
 - a) Keputusan
keputusan pemerintah mengubah Rasta menjadi kebijakan BPNT di Kelurahan Jayawaras terdapat komentar positif dan negatif. Positif karena terasa dari BPNT ini KPM bisa mengatur sendiri keuangan yang diberi oleh pemerintah untuk dibelanjakan sembako dan juga KPM mendapatkan nutrisi dan gizi yang baik, selain itu KPM tidak perlu mengantri lagi di kandor Desa/Kelurahan untuk mendapatkan Bansos dari pemerintah tetapi sekarang KPM dapat membeli langsung di e-Warong setempat. Sedangkan negatif yaitu tujuan dari BPNT belum semuanya tercapai dikarenakan kurangnya tenaga pendamping yang dimana mempunyai peranan untuk menjelaskan mengenai program BPNT lebih jelas dan juga kuota untuk mendapatkan program BPNT sangat terbatas sehingga belum semua masyarakat miskin di Kelurahan mendapat Program BPNT.
 - b) Sasaran
Untuk menjadi KPM harus masyarakat miskin dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah yang menjalankan program BPNT dan harus terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT).
 - c) Pelaksanaan
untuk menjadi agen e_warong syarat utamanya yaitu memiliki warung dan kapital yang memadai yaitu kapasitas agen harus bisa mengcover keperluan bahan pangan KPM dan juga harus mempunyai alat transaksi digital yaitu mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Dan di Kelurahan Jayawaras peran dari pengelola agen e-warong nya sangat baik mengerti akan kebutuhan dari KPM dan juga dapat mengelola jadwal agar tidak terjadi penumpukan di warung agen. Dan peran dari kelurahan pun dalam pendampingan baik dikarenakan selalu melakukan kordinasi dengan RT & RW dan agen E-Warong untuk membantu sebagai penampung aspirasi/keluhan dari KPM.
 - d) Pendapatan
masyarakat bisa dikatakan miskin karena pendapatannya yang rendah sehingga mengakibatkan ketidakmampuan untuk membeli bahan pangan yang bergizi untuk kehidupan sehari-harinya sehingga sangat membutuhkan program BPNT agar mendapatkan asupan gizi yang baik. Di Kelurahan Jayawaras pun apabila KPM pendapatannya sudah membaik maka mereka pun akan mengundurkan diri dengan sendirinya dikarenakan tingkat kesadarannya baik mempunyai rasa kasihan terhadap masyarakat miskin yang lebih membutuhkan.
 - e) Kebutuhan
Dengan adanya kenaikan dana BPNT tentu membuat KPM semakin senang dikarenakan dana tersebut tidak hanya di tukarkan dengan beras dan telur saja tetapi juga akan mendapatkan daging, sayuran, dan juga buah-buahan yang dimana asupan gizi KPM pun lebih baik lagi walaupun dengan pendapatan yang kurang.
- b. Faktor-faktor penyebab belum optimalnya program BPNT dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul

Suatu kebijakan program yang di buat oleh pemerintah tentu akan menghadapi kendala yang mengakibatkan belum optimalnya program kebijakan tersebut sebab tidak semua instrumen nya berjalan dengan baik. Di Kelurahan Jayawaras program BPNT ini dapat dikatakan berhasil dikarenakan masyarakat miskin yang mendapatkan BPNT merasakan manfaat asupan gizinya yang baik karena agen E-Warong nya dapat mengelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan KPM di Jayawaras. Tetapi dalam 5 bidang yaitu perencanaan, pelaksanaan, sasaran, pendapatan, kebutuhan belum semuanya optimal di kelurahan Jayawaras dikarenakan adanya beberapa faktor.

a) Perencanaan

Bahwa pemerintah belum bisa mempermudah masyarakat miskin untuk mendapatkan program BPNT, sebab masih masyarakat miskin mengakui bahwa untuk menjadi penerima program BPNT itu sulit mulai dari segi teknologinya yang membuat KPM tidak mengerti dan juga segi kemudahannya untuk masuk ke dalam BDT dan aplikasi SIKS-NG.

b) Pelaksanaan

KKS yang tidak bisa di gesek di sebabkan oleh kartu yang rusak, eror, ataupun hilang. Maka dari itu seharusnya peran pendamping tingkat Kelurahan sangat di perlukan untuk membantu hal tersebut, selain itu peran pendamping juga sangat diperlukan untuk membantu mengupayakan agar masyarakat dapat mengembangkan dan membina kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dari KPM agar tidak ketergantungan bantuan apabila nanti taraf hidupnya sudah meningkat.

c) Sasaran

untuk masuk ke dalam BDT sangat lah sulit dikarenakan dalam 1 hari hanya bisa memasukan 2 orang saja se Kabupaten hal tersebut menyebabkan protesnya masyarakat miskin kepada pihak Kelurahan padahal itu bukan wewenang dari Kelurahan. Oleh karena itu pemerintah seharusnya memperbaiki agar bisa lebih mudah dan memperbanyak untuk bisa masuk ke dalam BDT agar semua masyarakat miskin bisa merasakan program BPNT untuk mengurangi beban pengeluaran sehari-hari dalam membeli bahan pokok makanan serta menambah asupan gizi yang baik bagi masyarakat miskin.

d) Pendapatan

faktor yang menyebabkan belum optimalnya program BPNT dalam bidang pendapatan khususnya di Kelurahan Jayawaras yaitu harus adanya penggalan potensi atau pemberdayaan diri dari KPM agar bisa mengembangkan bakatnya untuk menghasilkan pendapatan lebih dalam sehari-hari agar KPM bisa mandiri dan bisa mengubah pola pikir dari KPM supaya bisa bertahan apabila nantinya program BPNT itu berhenti.

e) Kebutuhan

faktor belum optimalnya program BPNT dalam bidang kebutuhan yaitu belum semua KPM BPNT di Kelurahan Jayawaras mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik dan juga belum semua anak dari KPM Jayawaras mempunyai Kartu Indonesia Pintar yang dimana sangat membantu anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar ke depan nya bisa merubah taraf hidup keluarga miskin bisa lebih membaik.

4. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu 1) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Jayawaras sudah dapat di katakan berhasil sebab menurut data dan hasil wawancara dengan semua narasumber bahwa keputusan pemerintah mengubah Rasta menjadi BPNT berjalan dengan baik karena KPM tidak perlu lagi mengantri di kantor Kelurahan untuk mendapatkan beras tetapi dengan BPNT KPM bisa mengontrol dana nya sendiri dan bisa langsung menggesek di agen e-warong dengan bahan pangan yang lebih bergizi seperti beras, telur, daging, buah dan

sayuran. Oleh sebab itu BPNT sudah cukup membantu masyarakat miskin karena dapat mengurangi beban kebutuhan sehari-harinya yang di sebabkan oleh pekerjaan serabutan yang menyebabkan penghasilan tidak tentu sehingga KPM mendapatkan asupan gizi yang baik untuk keluarganya. Pengelolaan agen e-Warong di Kelurahan Jayawaras pun sangat baik dikarenakan kordinasi dengan Kelurahan dan Bank penyalur selalu di lakukan apabila ada KPM yang mempunyai masalah/kendala maka akan langsung di data untuk di laporkan kepada Kelurahan dan Bank Penyalur agar dapat langsung di bantu. Oleh karena itu pengelolaan Agen E-Warong di Kelurahan Jayawaras selalu di jadikan sampel untuk pemeriksaan Dinas Sosial terhadap salah satu desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Tarogong Kidul dan juga sebagai contoh oleh kelurahan/desa yang lain karena pengelolaan nya yang baik. 2) Faktor-faktor penyebab belum optimalnya program BPNT di Kelurahan Jayawaras dalam bidang Perencanaan yaitu bahwa pemerintah belum bisa mempermudah masyarakat miskin untuk mendapatkan program BPNT, sebab masih masyarakat miskin mengakui bahwa untuk menjadi penerima program BPNT itu sulit mulai dari segi teknologinya yang membuat KPM tidak mengerti dan juga segi kemudahannya untuk masuk ke dalam BDT. Dalam bidang Pelaksanaan yaitu belum adanya pendampingan di tingkat Kelurahan yang dimana perannya sangat penting dalam membantu mengupayakan agar masyarakat dapat mengembangkan dan membina kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dari KPM, selain itu besaran dana BPNT dinilai belum mencukupi dikarenakan dana nya terlalu kecil sehingga belum memenuhi semua kebutuhan pokok dari KPM. Dalam bidang Sasaran yaitu belum semua masyarakat miskin mendapatkan program BPNT dikarenakan terbatasnya kuota per hari masyarakat miskin untuk masuk ke dalam BDT. Dalam bidang Pendapatan yaitu belum adanya penggalian potensi atau pemberdayaan diri dari KPM agar bisa mengembangkan bakatnya untuk menghasilkan pendapatan lebih dalam sehari-hari agar KPM bisa mandiri dan bisa mengubahan pola pikir dari KPM supaya bisa bertahan apabila nantinya program BPNT itu berhenti. Dan dalam bidang Kebutuhan yaitu belum semua KPM BPNT di Kelurahan Jayawaras mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik dan juga belum semua anak dari KPM Jayawaras mempunyai Kartu Indonesia Pintar yang dimana sangat membantu anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar ke depan nya bisa merubah taraf hidup keluarga miskin bisa lebih membaik.

5. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti kemukakan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam memperbaiki dari kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Jayawaras. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

- a. Kepada Agen E-Warong Kelurahan Jayawaras, diharapkan agar tetap mengelola dengan baik untuk menyediakan kebutuhan KPM dan juga selalu melakukan koordinasi dengan Kelurahan maupun Bank Penyalur agar cepat merespon keluhan/masalah dari KPM.
- b. Kepada Kelurahan Jayawaras agar terus melakukan pengawasan yang baik dan juga melakukan koordinasi dengan Agen E-Warong dan Bank Penyalur agar cepat membantu keluhan/masalah dari KPM.
- c. Kepada Dinas Sosial diharapkan untuk mempermudah segi teknologinya agar KPM dapat mudah daftar masuk ke dalam BDT dan aplikasi SIKS-NG.
- d. Kepada Dinas Sosial diharapkan menyedianakan pendamping di tingkat Kelurahan yang dimana perannya sangat penting dalam membantu mengupayakan agar masyarakat dapat mengembangkan dan membina kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dari KPM.
- e. Kepada Dinas Sosial diharapkan lebih meningkatkan kuota dari sistem BDT supaya masyarakat miskin semuanya dapat merasakan manfaat dari BPNT untuk meningkatkan gizi dari KPM.

- f. Kepada Dinas Sosial diharapkan agar membuat program untuk penggalian potensi atau pemberdayaan diri dari KPM agar bisa mengembangkan bakatnya untuk menghasilkan pendapatan lebih dalam sehari-hari.
- g. Kepada Dinas Sosial diharapkan memperbaiki akses pelayanan kesehatan agar lebih baik dan juga meratakan batuan di bidang pendidikan untuk KPM.

Ucapan Terima Kasih

Dalam hal ini penulis sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sangat besar kepada: Kedua Orang Tua Penulis, Keluarga Penulis, Teman-teman dan saudara penulis.

Daftar Pustaka

- Aceng Ulumudin, Nurbudiwati, Mila Karmila, & Resin Reli Amrilah. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 1–8.
- Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Gugun Geusan Akbar, Ikeu Kania, Aceng Ulumudin, Grisna Anggadwita, Lintang Sukma Harmanto, & Dini Turipanam Alamanda. (2019). Innovation in the Public Sector: The effectiveness of " LAPOR!" as one of the Smart City Programs in Bandung. *International Symposium on Social Sciences, Education, and Humanities (ISSEH 2018)*.
- Hartawan. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 5(1), 59–68.
- Ikeu Kania, & Iis Zilfah Adnan. (2007). *Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui Pelaksanaan Peran Gender dalam Industri Kecil Rumah Tangga di Kabupaten Garut: Laporan Penelitian Kajian Wanita*.
- Iriany, I. S., Purnawan, A., & Nugraha, A. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 9–16. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v10i2.36>
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(1).
- Jonaidi, A. (2012). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
- Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam : The Leaders Writing*, 1(1).
- Kania, I., Akbar, G. G., & Budiman, M. (2019). *Causative Factors of Indonesia's Rural Areas' Low Funding*. 343(2), 388–390. <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.80>
- Kania, I., Alamanda, D. T., Pundenswari, P., & Ramdhani, A. (2020). Waste management by Garut youth movement, Indonesia. *Test Engineering and Management*, 82(3738), 3738–3745.

- Kuriawan, W. A., Alamanda, D. T., Ramdhani, A., & Akbar, G. G. (2019). *Modul Praktika Komputer II*. Universitas Garut.
- Ramdhani, A., Alamanda, D. T., Nurdiawan, A. M., & Arief, M. (2019). Problem Arising From New Technology on Government, the Use of Hay.U Application in Bandung, Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(2), 149. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i2.1889>
- Ramdhani, A., Kuriawan, W. A., Alamanda, D. T., & Akbar, G. G. (2018). *Modul Praktika Komputer I*. Universitas Garut.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2016). *Penelitian Pemasaran* (1st ed.). Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ulumudin, A., Nurbudiwati, Karmila, M., & Amrilah, R. R. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2).
- Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Kecamatan Kanigaraan Kota Probolinggo. *REFORMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9, 138–152.